

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
135/PUU-XXII/2024 TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**ZETTI SETYAWATI**

**2210111066**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)**



**Pembimbing:**

**Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H**

**Fadli Ramadhanil, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

**No. Reg : 01/PK-V/III/2026**

## ABSTRAK

### IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK

(Zetti Setyawati, 2210111066, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Tata Negara, 102 halaman, 2026)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah menimbulkan implikasi terhadap kelembagaan serta pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kompleksitas pemilu serentak lima kotak sebelumnya menyebabkan penumpukan beban tugas dan tekanan manajerial yang tinggi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dinilai memiliki dampak terhadap kapasitas kelembagaan KPU dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh sebab itu, perumusan masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana kapasitas kelembagaan KPU dalam penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan serentak daerah? Kedua, bagaimana beban tugas KPU dalam penyelenggaraan tahapan pelaksanaan pemilu serentak nasional dan serentak daerah?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kapasitas kelembagaan KPU dan mengkaji implikasi pemisahan pemilu terhadap pelaksanaan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data empiris melalui wawancara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan KPU menjadi aspek yang sangat penting dalam menghadapi perubahan desain penyelenggaraan pemilu, khususnya setelah adanya pemisahan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Penguatan tersebut terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas manajerial dalam mengelola tahapan pemilu serta membenahan sistem rekrutmen penyelenggara guna menjamin stabilitas dan keberlanjutan kepemimpinan kelembagaan. Selain itu, pemisahan pemilu juga menuntut adanya restrukturisasi tugas KPU dalam pengelolaan tahapan pemilu agar pelaksanaan dua siklus pemilu dapat berlangsung secara lebih terstruktur, proporsional, dan profesional. Oleh karena itu, Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memfokuskan upaya pada penguatan kapasitas kelembagaan KPU melalui peningkatan kemampuan manajerial, penguatan koordinasi antar tingkatan penyelenggara, serta membenahan sistem rekrutmen guna menjaga stabilitas kepemimpinan. Selain itu, diperlukan restrukturisasi tugas KPU yang disertai penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tahapan pemilu agar penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah dapat berjalan secara lebih efektif, terstruktur, dan profesional.

**Kata Kunci:** Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, Kapasitas Kelembagaan KPU, Tugas.

## ABSTRACT

### **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK**

*(Zetti Setyawati, 2210111066, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Tata Negara, 102 halaman, 2026)*

Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024, which separates national and regional elections, has implications for the institutional framework as well as the performance of the duties of the General Elections Commission (KPU). The complexity of the previous five-box simultaneous elections led to a backlog of tasks and high managerial pressure. Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 is considered to have an impact on the KPU's institutional capacity in carrying out its duties. Therefore, the research questions to be examined in this study are: First, what is the KPU's institutional capacity in conducting simultaneous national and regional elections? Second, what are the workload of the KPU in managing the implementation stages of simultaneous national and regional elections? This study aims to analyze the adequacy of the KPU's institutional capacity and examine the implications of the separation of elections on the performance of its duties. The research method employed is normative legal research using a legislative, conceptual, and case-based approach, supported by empirical data through interviews. The findings of the discussion indicate that strengthening the institutional capacity of the KPU is a critical aspect in addressing changes to the electoral administration framework, particularly following the separation of national simultaneous elections from regional simultaneous elections. This strengthening is primarily related to enhancing managerial capacity in managing election stages and reforming the recruitment system for election officials to ensure the stability and continuity of institutional leadership. Furthermore, the separation of elections also requires a restructuring of the KPU's duties in managing election stages so that the conduct of the two election cycles can proceed in a more structured, proportional, and professional manner. Therefore, the Government and lawmakers need to focus their efforts on strengthening the KPU's institutional capacity through improved managerial capabilities, enhanced coordination among election administration levels, and reform of the recruitment system to maintain leadership stability. In addition, a restructuring of the KPU's duties is required, accompanied by the enhanced use of information technology in managing election stages, so that the conduct of national simultaneous elections and regional simultaneous elections can proceed more effectively, in a structured manner, and professionally.

**Keywords:** Constitutional Court Decision 135/PUU-XXII/2024, Institutional Capacity of the General Elections Commission, Duties.